



Kabarano

Januari - Maret 2019

Catatan Redaksi

Edisi pertama kabarano periode Januari - Maret 2019 mewartakan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta kegiatan-kegiatan diluar pemeriksaan.

Periode Januari - Maret 2019 ditandai dengan pelaksanaan peringatan HUT BPK RI ke 72, Pengambilan Sumpah dan Janji PNS, Pengaduan Masyarakat serta Sosialisasi Dana Desa oleh Anggota VI BPK RI



Peran Strategis BPK dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Lebih dari tujuh dekade usia BPK, telah banyak sumbangan bagi kemajuan negara dan bangsa kita. Peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Kementerian Lembaga dan Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan kontribusi besar BPK dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Demikian di sampaikan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sultra, Hermanto dalam membacakan Pidato Ketua BPK RI pada Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-72 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Senin (21/01). Selanjutnya Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sultra juga kembali menghimbau dan menekankan pada seluruh insan BPK untuk memegang teguh nilai dasar; independensi, integritas dan profesionalisme dengan menjaga semangat kekeluargaan sehingga dapat menjaga kepercayaan rakyat kepada BPK.

Dirgahayu BPK Ke-72 !

Energi-Sinergi-Prestasi



BPK Sultra Terima Aksi Massa Terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sultra, Jumat (01/02), Aksi Massa Perkumpulan Pengawas Independen Indonesia (Wasindo Sultra) menyampaikan laporan pengaduan terkait indikasi penyalahgunaan anggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Sultra. Pengaduan tersebut terkait indikasi penyimpangan anggaran pembangunan renovasi gedung kantor pengelola PAUD dan Diknas Sultra.

Dugaan adanya kekurangan volume dan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya mengemuka dalam diskusi melalui penyampaian pengaduan yang diterima langsung oleh Kepala Sub Bagian Humas dan TU Kalan Sultra, Nur Kurniawan. Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan dari aksi massa berharap pengaduan yang disampaikan dapat menjadi bahan informasi dalam pelaksanaan pemeriksaan yang akan dan sedang dilaksanakan oleh BPK



Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil



Pengambilan Sumpah yang dilaksanakan pada hari Jumat (01/02) dilakukan berdasarkan keyakinan agama yang anut dan diwakili oleh 2 orang pegawai yang didampingi oleh rohaniawan serta turut pula disaksikan langsung oleh pejabat struktural, tim pemeriksa, tamu undangan dan para pegawai pada lingkup BPK Perwakilan

Begitu kuatnya dampak perikatan sumpah tersebut sehingga harus dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang terkait dengan instansi serta menjaga nama baik korps dimanapun pegawai tersebut berada. Demikian disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sultra, Hermanto, dalam membacakan sambutan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Lebih lanjut, beliau menekankan pemahaman mendalam terkait etika dalam bekerja, sopan santun dalam bersosialisasi dilingkungan kerja, mengenal dan menghormati Pimpinan maupun rekan sekerja.



Aksi Massa Desak BPK Sultra Periksa



Rabu (02/20), Bertempat di Kantor BPK Sultra, Massa dari gabungan ormas kepemudaan dan LSM mendesak pihak BPK Sultra untuk melakukan audit terkait pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Jaminan reklamasi serta jaminan pasca tambang. Aksi Massa diterima langsung Kasubag Humas dan TU Kalan BPK Sultra, Nur Kurniawan.

Dalam Pernyataan Sikapnya, gabungan ormas kepemudaan dan LSM mendesak dilakukannya audit terhadap setoran jaminan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan berdasarkan PP. No78 tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Hal tersebut berkenaan dengan belum jelasnya landasan atau dasar hukum penunjukan bank tertentu yang menampung pengelolaan dana tersebut serta penggunaan adanya potensi penggunaan dana reklamasi dan pascatambang untuk hal yang berindikasi

BPK Sultra Gelar Diskusi Terkait Pemeriksaan dan Tindak Lanjut



Bertempat di aula BPK Sultra, Selasa (02/12), dilaksanakan kegiatan Diskusi terkait Pemeriksaan dan Tindak Lanjut. Acara yang dihadiri oleh para Kepala Daerah dan jajaran Pemerintah Daerah Se-Sultra tersebut diawali dengan sambutan Kepala Perwakilan BPK Sultra, Hermanto. "Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebagai bagian dari pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah wajib untuk didorong pelaksanaannya.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai langkah perbaikan tentunya akan mendorong peningkatan kehandalan Sistem Pengendalian Intern sebagai bagian kriteria Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah." Ungkap Kepala BPK Perwakilan Prov Sultra.

Kegiatan yang berlangsung selama sehari tersebut, mengagendakan Jadwal Penyampaian LKPD TA 2018 (unaudited) dari pemerintah daerah kepada BPK ; Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2018 dan Optimalisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Ketiga agenda diskusi tersebut, mengamanatkan suatu kewajiban konstitusional baik kepada pemerintah daerah maupun BPK, dan kepada pemerintah daerah dan BPK diberikan batasan waktu yang jelas untuk menjaga berjalan tertibnya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Pesan Anggota VI BPK RI terkait Pengelolaan Dana Desa



Acara Sosialisasi yang bertajuk Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara berjalan lancar, Konawe kepulauan (14/3/2019). Sebagai narasumber anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz dan Komisi XI DPR RI Amirul Tamim. Hadir pula Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan serta dihadiri Kepala Daerah se Kabupaten Konawe Kepulauan.

Anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz mengingatkan para kepala desa untuk memperhatikan lima aspek yang menjadi kunci dalam pengelolaan dana desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan BPK dan DPR untuk mendorong secara aktif terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia, termasuk kabupaten konawe kepulauan.

Tahun ini anggaran dana desa dari pemerintah pusat naik menjadi Rp70 triliun untuk 74.953 desa. Dua tahun sebelumnya, yaitu 2018 dan 2017, dana desa dianggarkan sebesar Rp60 triliun. "Saat ini ada 89 desa di Kabupaten Konawe Kepulauan yang tersebar di tujuh kecamatan yang masing-masing mendapatkan DD sekira Rp 800 juta. Belum lagi anggaran yang bersumber dari ADD atau anggaran lainnya. Kondisi ini dapat memberikan modal kuat bagi desa untuk membangun potensi wisata alam maupaun wisata kuliner guna membangun perekonomian dari desa," ujar Amrullah.

